

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH: BUDAYA ORGANISASI
DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Study kasus pada Dinas Sosnakertrans, Dinas Kesehatan, dan Dinas
Pertanian di Kabupaten Klaten)**



Dimaksud Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Mamenuhi Syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FARIDA NUR HIDAYATI
B 200 060 041

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau formulir S). RASK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran(program dan kegiatan anggaran) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

RASK memuat juga standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. RASK merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang selama ini digunakan dalam penyusunan rancangan APBD dengan sistem lama. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan

dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Sardjito dan Osmad, 2007).

Penyusunan Anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode *top down* maupun *bottom up*. (Anthony et.al, 1992, Poerwati, 2002 dalam Falikhatus, 2005) menyatakan bahwa penyusunan anggaran dengan metode *bottom up* atau disebut dengan anggaran partisipatif mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Anggaran partisipatif merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan keefektifan organisasional melalui peningkatan kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber daya yang ada terutama dengan adanya Undang-undang tentang otonomi daerah. Peraturan pemerintah tersebut mendorong pemerintah daerah untuk membentuk roda pemerintahannya sendiri dengan dinas kabupaten/ kota.

Hal ini berarti pemerintahan daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang menjadikan unsur pelaksana dan staf di pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu partisipasi yang dapat dilakukan adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran. Sebagai rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang

(Rupiah) dalam satu periode tertentu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini disusun dengan pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/ *output* dan perencanaan alokasi biaya/ *input* yang ditetapkan atau disebut juga dengan anggaran kinerja yang tentu saja membutuhkan partisipasi dari seluruh unsur yang terkait (Kusdarti, 2001 dalam Falikhatun, 2005) .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik dan untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kota Klaten sebagai penyusun anggaran yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. (Sardjito dan Muthaher, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAHAN DAERAH : BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi?
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan adanya budaya organisasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut maka, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial.
2. Menguji secara empiris sejauh mana komitmen organisasi dalam organisasi yang berfungsi sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.
3. Menguji secara empiris sejauh mana budaya organisasi dalam organisasi yang berfungsi sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai acuan pengukuran kinerja manajerial dengan adanya budaya organisasi dan komitmen organisasi.
2. Bagi Perusahaan, agar pihak manajemen dapat mengetahui bahwa dalam meningkatkan kinerja manajerial perusahaan akan berjalan dengan lebih baik apabila menetapkan alat pengukuran non financial.
3. Bagi pihak pembaca, agar mendapatkan informasi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penelitian

Adapun Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi definisi anggaran, karakteristik anggaran, proses penyusunan anggaran, tingkat kesulitan dari target anggaran, fungsi anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dengan aparatur

Pemerintahan Daerah, definisi budaya organisasi, elemen budaya organisasi, pengaruh budaya organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran, definisi komitmen organisasi, komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi diskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN